

## Determinan faktor peningkatan kualitas hidup manusia dan ketimpangan pendapatan di ASEAN-8 periode 2010-2023

Nuraini Chaniago <sup>\*</sup>, Raden Ajeng Entaresmen & Azizah Amelia Eka Susanti

AKURASI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

99

### Abstract

This study analyzes economic factors influencing the Human Development Index (HDI) and Gini Ratio in eight ASEAN countries during 2010–2023. The findings of secondary data and panel data regression analysis indicate that per capita income, inflation, and labor force significantly affect HDI. A negative relationship between HDI and Gini Ratio was also identified, implying that improved human development can reduce income inequality. However, the results also highlight that economic growth does not always enhance life quality due to unequal distribution. Inclusive and redistributive policies in education, healthcare, and employment are essential to enhance HDI and reduce regional income disparities.

### Public interest statements

This research provides insights into how economic and social factors impact the quality of life in ASEAN countries. The public can recognize the significance of inclusive and redistributive policies by examining the relationship between the Human Development Index (HDI) and income inequality. The study encourages community members to advocate for policies that enhance access to education, healthcare, and employment opportunities. By promoting these initiatives, individuals can improve overall well-being and reduce social inequality within their communities.

**Keywords:** Human Development Index, Gini Ratio, Per Capita Income, Inflation, and Labor Force.

**Paper type:** Research paper

✉ Corresponding: Nuraini Chaniago. Email: [nuraini\\_chaniago@trisakti.ac.id](mailto:nuraini_chaniago@trisakti.ac.id)



© The Author(s) 2025  
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.

### ARTICLE INFO:

Received 12/12/2024  
Revised 1/20/2025  
Accepted 2/4/2025  
Online First 4/17/2025



AKURASI: Jurnal Riset  
Akuntansi dan Keuangan,  
Vol 7, No. 1, 2025, 99-112  
eISSN 2685-2888

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Rasio Gini di delapan negara ASEAN selama periode 2010–2023. Hasil analisis data sekunder dan regresi data panel menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, inflasi, dan angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Selain itu, ditemukan hubungan negatif antara IPM dan Rasio Gini, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, hasil penelitian juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkatkan kualitas hidup akibat distribusi yang tidak merata. Kebijakan yang inklusif dan redistributif di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan sangat penting untuk meningkatkan IPM dan mengurangi ketimpangan pendapatan di kawasan tersebut.

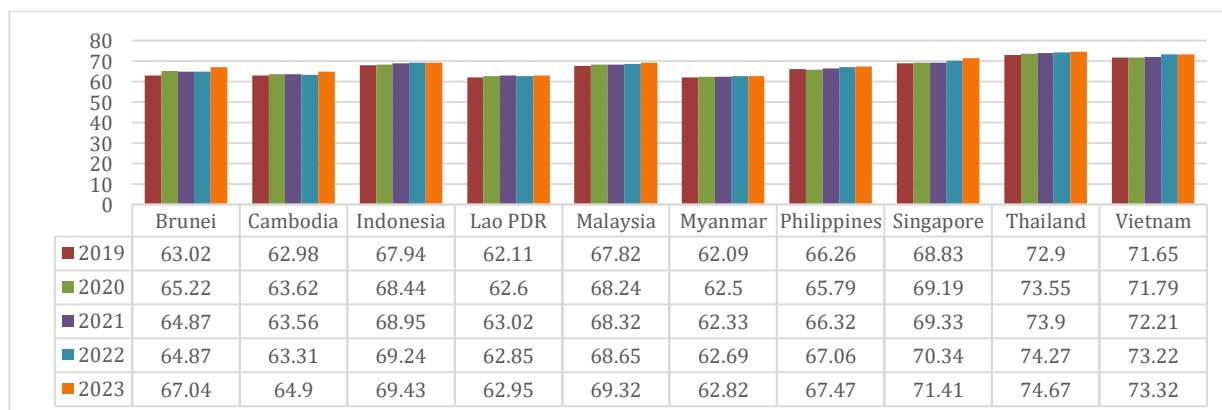
**Pernyataan kepentingan publik**

Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana faktor ekonomi dan sosial memengaruhi kualitas hidup di negara-negara ASEAN. Masyarakat dapat mengenali pentingnya kebijakan yang inklusif dan redistributif dengan mengkaji hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketimpangan pendapatan. Studi ini mendorong anggota komunitas untuk mengadvokasi kebijakan yang meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dengan mempromosikan inisiatif ini, individu dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dan mengurangi ketimpangan sosial di dalam komunitas mereka.

**Kata Kunci:** Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Gini, Pendapatan Per Kapita, Inflasi, Dan Angkatan Kerja.

**PENDAHULUAN**

Tujuan utama dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah untuk mengatasi berbagai tantangan global yang saling terkait, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan perubahan iklim. SDGs mencakup 17 target yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara berhasil dalam menerapkan SDGs adalah dengan menilai kinerja pemerintah berdasarkan indikator-indikator SDGs dan data makroekonomi (Sachs et al., 2016). Bidarbakht-Nia (2019) menekankan pentingnya penggunaan indikator yang tepat dan relevan untuk setiap tujuan, sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan akurat.



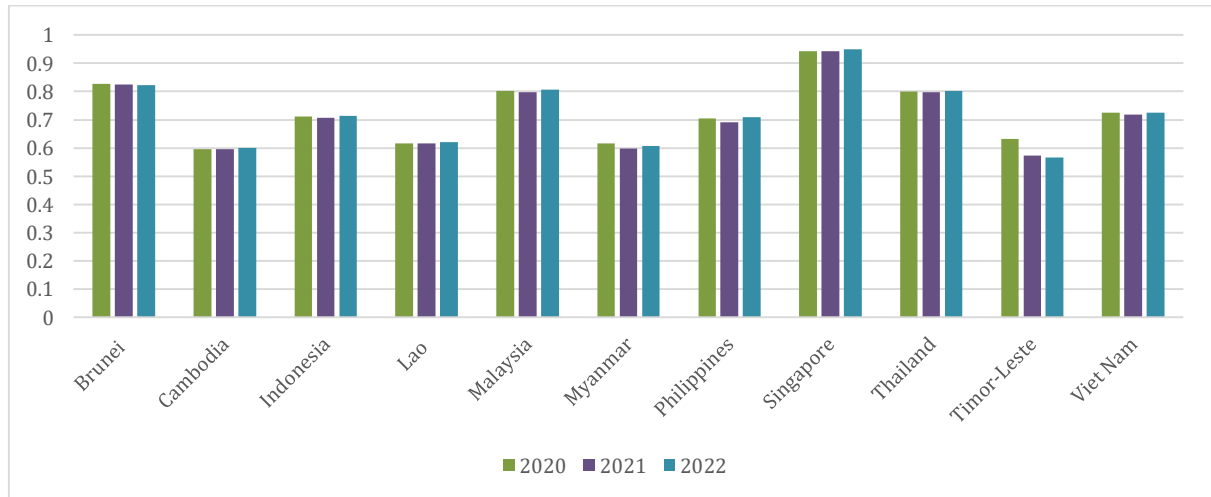
Sumber: The Sustainable Development Report, 2024

**Gambar 1.**

*Perbandingan Skor Keseluruhan Pencapaian SDGs di Negara-Negara ASEAN, 2019-2023*

Gambar 1 menunjukkan perbandingan pencapaian 17 tujuan SDGs di negara-negara ASEAN dari tahun 2019 hingga 2023, dengan Singapura menduduki peringkat teratas dengan skor 71,41. Thailand dan Vietnam juga menunjukkan kemajuan yang baik dengan skor masing-masing 74,67 dan 73,32, berkat peningkatan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, Myanmar dan Kamboja memiliki skor lebih rendah, yaitu 62,82 dan 64,9, yang mencerminkan tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Indonesia, meskipun meningkat dari 67,94 menjadi 69,43, masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand, menunjukkan perlunya perhatian lebih pada pemerataan pembangunan. Namun, disparitas SDGs yang signifikan antarnegara menunjukkan kesenjangan yang berarti antara negara di kawasan ASEAN. Singapura, Thailand, dan Vietnam telah menunjukkan keberhasilan yang dapat menjadi model bagi negara-negara lain di kawasan ini.

Untuk mencapai SDGs secara efektif, kebijakan yang terfokus pada pendidikan, infrastruktur kesehatan, energi bersih, dan pengentasan kemiskinan sangat diperlukan, terutama di negara-negara dengan kinerja rendah seperti Myanmar dan Kamboja yang memerlukan dukungan internasional. Indonesia, dengan sumber daya alam melimpah, harus mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Memperkuat koordinasi antar level pemerintahan dan memastikan penerapan kebijakan berbasis data akan mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia dan menjadikannya model bagi negara-negara lain di kawasan ini. Jika SDGs dapat tercapai dengan baik, maka IPM dan kesenjangan pendapatan (Gini Ratio) dapat berkurang, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Sumber: Asian Development Bank Institute, 2024

### Gambar 2.

*Perbandingan Skor Keseluruhan Pencapaian SDGs di Negara-Negara ASEAN, 2019-2023*

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dengan angka di atas 5%, hal ini tidak sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. IPM Indonesia masih kalah dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Brunei, bahkan jauh di belakang Singapura. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara kualitas modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Namun, studi yang dilakukan oleh Hamzah et al. (2012) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia justru memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap IPM, karena kualitas pertumbuhannya tidak cukup baik untuk meningkatkan standar hidup.

Untuk mencapai tujuan SDGs dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara-negara di ASEAN perlu mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan upaya pengembangan modal manusia. Ini termasuk alokasi anggaran yang tepat untuk pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang pada gilirannya akan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan IPM di seluruh kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan yang ada, dengan bukti bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM.

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat melalui proses produksi yang melibatkan beragam faktor. Mankiw (2008) menilai pertumbuhan ini menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator utama, karena mencakup nilai tambah dari kegiatan produksi. Teori klasik Adam Smith berpendapat bahwa pasar akan mencapai keseimbangan secara otomatis, sedangkan Keynes berargumen bahwa permintaan tidak selalu selaras dengan penawaran, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk mendorong permintaan dan menghadapi resesi, berbeda dengan optimisme klasik terhadap fungsi pasar.

IPM menilai keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Teori Mahbub ul Haq menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup, kebebasan, dan kesempatan. Sejak 1990, indikator IPM telah diperbarui, memasukkan rata-rata lama sekolah dan pendapatan nasional bruto per kapita. IPM yang tinggi seringkali berhubungan dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang terukur dengan Gini Ratio, serta pengurangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Inflasi, yang merupakan kenaikan harga barang dan jasa, dapat mengurangi daya beli masyarakat dan terjadi karena permintaan yang tinggi (demand-pull) atau biaya produksi yang meningkat (cost-push). Pertumbuhan ekonomi terkait dengan peningkatan pendapatan melalui inovasi dan efisiensi. Menurut Kuznets (dalam Theyson, 2015), pertumbuhan ekonomi modern ditandai oleh urbanisasi dan peningkatan perdagangan global. Inflasi yang tidak terkendali dapat menghambat pertumbuhan, tetapi kebijakan yang tepat dapat menciptakan keseimbangan dan stabilitas ekonomi.

Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak langsung pada kualitas hidup. Dalam model pembangunan manusia, pendapatan per kapita menjadi indikator kesejahteraan yang membantu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor penting guna meningkatkan IPM. Penelitian, termasuk oleh Sofilda et al. (2015) dan Handalani (2019), mengungkapkan bahwa individu dengan pendapatan tinggi memiliki akses lebih baik terhadap layanan penting dan dapat berinvestasi lebih untuk anak-anak, sehingga memperkuat hipotesis.

**H1:** Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap IPM.

Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun, sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan, yang merupakan komponen penting IPM. Inflasi juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang menghambat investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, sehingga membatasi peningkatan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, kenaikan inflasi meningkatkan biaya layanan publik, mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan dan kesehatan berkualitas. Secara keseluruhan, inflasi tinggi berdampak negatif pada kualitas hidup dan berkontribusi pada penurunan IPM. Pangesti (2018) serta Arisman (2018) dan Omodero (2019) mengungkapkan adanya hubungan negatif antara inflasi dan IPM. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah

**H2:** Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Partisipasi aktif angkatan kerja meningkatkan pendapatan masyarakat, yang memperluas akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, dua komponen penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keterlibatan dalam dunia kerja juga mendorong peningkatan keterampilan dan pendidikan, berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Tingkat partisipasi yang tinggi mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Faelassuffa (2021) dan Gani (2021) menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah:

**H3:** Angkatan Kerja berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

IPM yang lebih tinggi menunjukkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, yang mendukung individu dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan IPM seringkali beriringan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil, membantu mengurangi ketimpangan pendapatan, yang terlihat pada penurunan Gini Ratio. Penelitian oleh Saragih (2018) mengungkapkan bahwa IPM berkorelasi negatif dengan Gini Ratio, sementara Ramadhan (2024) menemukan bahwa kemajuan dalam pembangunan manusia berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan. Temuan dari Sen & Laha (2018) juga mendukung bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah:

**H4:** Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Gini Ratio.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama informasi, dengan fokus pada delapan negara di ASEAN-8, yaitu Indonesia, Malaysia, Kamboja, Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar dan Thailand. Tiga variabel independen yang dianalisis meliputi pendapatan per kapita, inflasi, dan angkatan kerja, sedangkan parameter dependen yang diperiksa adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Rasio Gini. Data diperoleh dari lembaga terpercaya seperti World Bank, UNDP, dan OECD, dengan periode penelitian dari tahun 2010 hingga 2023.

## Analisis data

Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi berganda dengan data panel, yang memberikan pemahaman komprehensif terhadap efek time series dan cross-sectional. Pendekatan ini juga menyederhanakan pemilihan model yang paling sesuai di antara tiga opsi, yaitu Fixed Effects Model, Random Effects Model, dan Common Effect Model. Untuk menentukan model yang paling tepat, dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Secara keseluruhan, penelitian ini menerapkan dua model dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap parameter dependen, sehingga menghasilkan analisis yang lebih akurat dan relevan.

## HASIL DAN DISKUSI

### Analisis statistik deskriptif

Dalam tabel 1, rata-rata tingkat angkatan kerja tercatat sebesar 2,9605, dengan nilai berkisar antara 0,0743 hingga 6,2591. Nilai median 3,2041 menunjukkan bahwa distribusi data sedikit condong ke kiri, mengindikasikan adanya wilayah atau periode dengan angkatan kerja yang rendah. Variasi dalam data angkatan kerja diukur dengan simpangan baku 1,3549, yang menunjukkan tingkatan variasi moderat.

Rasio Gini, yang mencerminkan ketimpangan ekonomi, memiliki rata-rata 0,3888 dan simpangan baku 0,0532. Nilai minimum dan maksimum untuk Rasio Gini masing-masing adalah 0,2700 dan 0,4650, sementara median 0,3902 menunjukkan distribusi yang relatif seimbang. Untuk IPM, rata-rata tercatat sebesar 0,7196, dengan nilai minimum 0,5060 dan maksimum 0,9490. Nilai median 0,7090 yang sedikit lebih rendah dari rata-rata, serta simpangan baku 0,1147, menunjukkan distribusi yang cukup tersebar.

Pendapatan memiliki rata-rata 4,7878, dengan rentang dari -9,5183 hingga 14,5000. Nilai negatif pada pendapatan menunjukkan ada kerugian dalam periode tertentu. Median pendapatan sebesar 5,4890 lebih tinggi dari rata-rata, yang menunjukkan adanya beberapa nilai rendah yang mempengaruhi distribusi. Simpangan baku 3,3535 mengindikasikan variabilitas yang signifikan. Selanjutnya, tingkat inflasi rata-rata adalah 3,7823, dengan nilai minimum -3,0690 dan maksimum 42,3033. Median inflasi 2,7585 yang lebih rendah dari rata-rata menunjukkan distribusi yang condong ke kanan, disebabkan oleh beberapa nilai inflasi yang sangat tinggi. Simpangan baku 5,2934 menunjukkan fluktuasi besar dalam tingkat inflasi. Secara keseluruhan, analisis deskriptif memberikan gambaran tentang variabilitas dan pola distribusi setiap variabel yang penting untuk penelitian terkait kondisi ekonomi dan sosial.

**Table 1.**

*Hasil uji statistic deskriptif*

	Angkatan kerja	Gini	IPM	pendapatan	Inflasi
Mean	2.9605	0.3888	0.7196	4.7878	3.7823
Minimum	0.0743	0.2700	0.5060	-9.5183	-3.0690
Maximum	6.2591	0.4650	0.9490	14.5000	42.3033
Median	3.2041	0.3902	0.7090	5.4890	2.7585
Standard Deviation	1.3549	0.0532	0.1147	3.3535	5.2934

Sumber: Data processed

### Hypothesis testing

Table 2 pada regresi model I menunjukkan nilai koefisien Adj R-squared sebesar 0.986777, yang berarti 98.67% variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sementara 1.33% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel angkatan kerja dan pendapatan menunjukkan signifikansi tinggi dengan nilai 0.0000 dan 0.0002 pada tingkat kepercayaan 1%, sedangkan inflasi memiliki signifikansi 0.0521 pada tingkat kepercayaan 10%. Hasil menunjukkan bahwa angkatan kerja dan pendapatan per kapita berdampak negatif terhadap IPM di ASEAN-8, bertentangan dengan teori yang memperkirakan hubungan positif. Inflasi juga menunjukkan koefisien negatif, mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi merugikan IPM.

Peningkatan pendapatan per kapita seharusnya meningkatkan IPM melalui akses lebih baik ke pendidikan dan kesehatan. Namun, ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan hubungan negatif ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ravallion (2021). Di beberapa negara ASEAN, tingginya pendapatan per kapita tidak selalu berdampak positif pada kualitas hidup karena ketimpangan akses layanan dasar, sehingga perlu kebijakan sosial yang inklusif. Kontradiksi antara angkatan kerja dan IPM terkait rendahnya kualitas pekerjaan, di mana banyak pekerja informal dan upah rendah menghambat kontribusi positif (Daniłowska et al., 2024). Inflasi tinggi juga menurunkan daya beli, memperburuk ketimpangan dan kualitas hidup, sehingga stabilitas harga menjadi penting.

**Table 2.**

*Hasil pengujian regresi data panel model I dan II*

Variabel	Teori	Beta	Std Error	T Stat	Prob
<b>Regresi data Model I</b>					
Konstanta		-0.250795	0.60649	-0.41352	0.6795
Pendapatan	+	-0.078792	0.048075	-163.895	0.0521
Inflasi	-	-0.06276	0.016958	-370.083	0.0002
Angkatan kerja	+	-1.405.214	0.261461	-5.37E+00	0.0000
Goodness of Fit					
R-square			0.986777		
Adj R-square			0.985468		
F-stat			7.537.082		
Prob F-stat			0.000000		
<b>Regresi data Model II</b>					
IPM	-	-0.473013	0.056278	-840.492	0.0000
Goodness of Fit					
R-square			0.949997		
Adj R-square			0.944497		
F-stat			1.727.162		

Catatan: Tingkat Signifikansi 1% dan 10%, Regresi model I: Menguji pengaruh langsung dari Pendapatan per Kapita, Inflasi, Angkatan Kerja terhadap IPM. Regresi model II: Menguji pengaruh IPM terhadap Gini Ratio.

Hasil regresi model II menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dan gini ratio memiliki koefisien negatif sebesar -0.473013 dengan tingkat signifikansi sangat tinggi (p-value 0.0000). Nilai R-square sebesar 0.949997 menunjukkan model ini dapat menjelaskan 94.99% variasi dalam variabel dependen, sementara F-statistik sebesar 172.7162 (p-value 0.000000) menegaskan

signifikansi keseluruhan model. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak selalu berdampak positif terhadap aspek ekonomi, kemungkinan akibat ketimpangan distribusi hasil pembangunan. Ini menekankan pentingnya kebijakan holistik agar peningkatan IPM sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Table 3.***Rata-Rata Persentase IPM dan Gini di ASEAN-8, 2010-2023*

Negara	Coefisien IPM	Coefisien Gini Ratio
Singapore	24.38896	15.66037
Malaysia	7.963601	6.7723
Thailand	5.555344	0.877231
Indonesia	-1.20134	-1.00563
Vietnam	-1.93652	-2.49323
Philippines	-2.02519	2.892316
Myanmar	-14.3116	-7.78243
Cambodia	-18.4332	-14.9209

Sumber: Data processed

Tabel 3, rata-rata persentase IPM menunjukkan hasil penjumlahan individu efek dan intersep model regresi menunjukkan bahwa Singapura memiliki nilai konstanta tertinggi sebesar 24.38896, yang berarti jika variabel angkatan kerja, pendapatan, dan inflasi dianggap nol, besar IPM di Singapura mencapai angka tersebut. Data ini sejalan dengan gambar yang menunjukkan Singapura sebagai negara dengan IPM tertinggi di antara negara ASEAN-8 selama 2020-2023.

Rata-rata persentase Gini di negara-negara ASEAN-8 menunjukkan variasi signifikan dalam ketimpangan pendapatan. Singapura dan Malaysia, dengan koefisien positif, mencerminkan perekonomian maju yang memperburuk kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah (Haq, 2024). Sementara itu, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja, yang memiliki koefisien negatif, berhasil menurunkan ketimpangan melalui kebijakan redistribusi yang efektif (Andriani, 2023). Di Indonesia, nilai negatif kecil mencerminkan upaya mengatasi ketimpangan, meskipun tantangan dari pekerja informal tetap ada.

**Table 4.***Perbandingan coefficient variabel GDP di ASEAN-8, 2010-2023*

Negara	Coefisien	Sig	Keterangan
Indonesia	-0.273978	0.0570	Negatif Signifikan
Malaysia	-0.054026	0.1905	Negatif Tidak Signifikan
Thailand	-0.274431	0.0359	Negatif Signifikan
Cambodia	-0.379829	0.0008	Negatif Signifikan
Myanmar	-0.457549	0.0043	Negatif Signifikan
Philippines	0.015519	0.2965	Positif Tidak Signifikan
Singapore	-0.038451	0.2419	Negatif Tidak Signifikan
Vietnam	-0.174825	0.1767	Negatif tidak Signifikan

Sumber: Data processed

Tabel 4 menunjukkan ketimpangan ekonomi berperan sebagai faktor kunci yang menjelaskan hubungan negatif antara pendapatan per kapita (GDP) dan IPM di negara-negara ASEAN-8. Meskipun GDP bisa meningkat, distribusi pendapatan yang tidak merata menghambat dampak positifnya terhadap IPM (Ali & Son, 2007). Kesenjangan sosial-ekonomi menghalangi manfaat pertumbuhan ekonomi pada sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan (Ravallion, 2021), sehingga tanpa redistribusi pendapatan, dampak positif dari GDP terhadap IPM akan terbatas. Misalnya, Myanmar dan Kamboja menunjukkan hubungan negatif signifikan antara GDP dan IPM karena ketidakmerataan akses ke layanan dasar. Ini menunjukkan perlunya kebijakan redistributif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Negara dengan ekonomi berbasis jasa atau dengan sektor manufaktur yang rendah juga mengalami hubungan negatif antara GDP dan IPM akibat kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan (Nayyar, 2013). Selain itu, rendahnya investasi sosial berdampak negatif terhadap hubungan ini di ASEAN-8. Negara seperti Indonesia dan Thailand, yang bergantung pada ekstraksi sumber daya, tidak selalu mampu meningkatkan kualitas hidup secara langsung. Tripathi et al. (2024) menggarisbawahi bahwa hubungan positif GDP dan IPM hanya muncul dengan investasi signifikan di sektor sosial. Oleh karena itu, penguatan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk mengoptimalkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap IPM.

**Table 5.**

*Perbandingan coefficient variabel inflasi di ASEAN-8, 2010-2023*

<b>Negara</b>	<b>Coefisien</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
Indonesia	-0.345552	0.0001	Negatif Signifikan
Malaysia	-0.136807	0.0951	Negatif Tidak Signifikan
Thailand	-0.564883	0.0717	Negatif Signifikan
Cambodia	0.427547	0.0139	Positif Signifikan
Myanmar	0.02489	0.4037	Positif tidak Signifikan
Philippines	0.012013	0.4668	Positif Tidak Signifikan
Singapore	-0.018018	0.3234	Negatif Tidak Signifikan
Vietnam	-0.02521	0.46915	Negatif tidak Signifikan

Sumber: Data processed

Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, karena harga kebutuhan dasar meningkat lebih cepat dari pendapatan (Sae-Lim, 2020). Hal ini menurunkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketidakstabilan ekonomi akibat inflasi yang tidak terkendali berdampak negatif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang lebih merugikan (Oo, 2022).

Namun, inflasi dapat berpengaruh positif terhadap IPM jika terjaga dalam tingkat yang terkendali. Inflasi stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat (Susanto, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa inflasi yang stabil dapat menurunkan kemiskinan dan meningkatkan belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, berkontribusi pada peningkatan IPM (Kawung & Padambo, 2021; Cahyadi & Ma'wa, 2023). Namun, manfaat ini hanya dapat dicapai jika inflasi tetap terkontrol.

**Table 6.***Perbandingan coefficient variabel angkatan kerja di ASEAN-8, 2010-2023*

<b>Negara</b>	<b>Coefisien</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
Indonesia	0.145918	0.4824	Postif Tidak Signifikan
Malaysia	-3.38565	0.0011	Negatif Signifikan
Thailand	-1.54985	0.2060	Negatif Tidak Signifikan
Cambodia	6.832013	0.0072	Positif Signifikan
Myanmar	-3.10225	0.0005	Negatif Signifikan
Philippines	-1.81598	0.0049	Negatif Signifikan
Singapore	-0.91486	0.0000	Negatif Signifikan
Vietnam	-2.01653	0.0044	Negatif Signifikan

Sumber: Data processed

Hipotesis tentang pengaruh positif angkatan kerja terhadap IPM tidak sepenuhnya terbukti berdasarkan data dari Tabel 6. Kamboja menunjukkan hasil positif signifikan, di mana peningkatan angkatan kerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup (Andriani, 2023). Namun, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Vietnam mengalami hubungan negatif yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara angkatan kerja dan lapangan kerja (Haq, 2024). Sementara itu, Indonesia memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan (Aini & Islamy, 2021), menandakan potensi yang belum dimanfaatkan. Terbatasnya ketersediaan pekerjaan menambah tekanan di pasar tenaga kerja, terutama di negara berpenduduk besar seperti Filipina (Hardana et al., 2023). Pengaruh ini tergantung pada kebijakan, investasi, dan pendidikan di masing-masing negara.

**Table 7.***Perbandingan coefficient variabel IPM di ASEAN-8, 2010-2023*

<b>Negara</b>	<b>Coefisien</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
Indonesia	-0.26357	0.0899	Negatif Signifikan
Malaysia	0.060805	0.4626	Negatif Tidak Signifikan
Thailand	-0.56623	0.0000	<b>Negatif Signifikan</b>
Cambodia	-0.52211	0.0030	Positif Signifikan
Myanmar	-0.36248	0.1422	Positif tidak Signifikan
Philippines	-0.71701	0.0886	Positif Tidak Signifikan
Singapore	-0.04731	0.4400	Negatif Tidak Signifikan
Vietnam	0.245886	0.2176	Negatif tidak Signifikan

Sumber: Data processed

Hasil di Tabel 7 menunjukkan hubungan negatif signifikan antara IPM dan Rasio Gini di Indonesia dan Thailand, tetapi positif di Kamboja. Hipotesis H4, yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap Rasio Gini, bervariasi tergantung konteks negara. Nurazi et al. (2019) mengungkapkan bahwa dampak IPM terhadap Rasio Gini tergantung pada distribusi manfaat pembangunan. Pembangunan yang terpusat pada kelompok tertentu, seperti kelas menengah, justru dapat memperburuk ketimpangan. Sebaliknya, negara dengan kebijakan redistribusi yang baik, seperti subsidi pendidikan dan kesehatan, umumnya mengalami penurunan Rasio Gini saat IPM meningkat.

Di Indonesia dan Thailand, peningkatan IPM berkontribusi pada pengurangan ketimpangan. Hartani et al. (2020) menekankan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan berdampak langsung pada pengurangan ketimpangan, menciptakan masyarakat yang lebih

produktif. Syadullah et al. (2019) mencatat banyak manfaat IPM terkonsentrasi di kota, memperburuk ketimpangan regional. Oleh karena itu, distribusi manfaat pembangunan penting dalam memahami hubungan ini. Negara dengan kebijakan redistribusi yang efektif menunjukkan pola di mana pembangunan manusia yang meningkat beriringan dengan kebijakan subsidi dan layanan publik yang inklusif, mampu mengurangi kesenjangan pendapatan.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan yaitu, penggunaan data sekunder menciptakan potensi untuk adanya kesalahan dalam akurasi atau kelengkapan data, yang dapat memengaruhi hasil analisis dan kesimpulan yang diambil. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup delapan negara ASEAN selama periode 2010 hingga 2023, sehingga temuan yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya mewakili dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas di kawasan tersebut. Keterbatasan ini juga mencakup tantangan dalam generalisasi hasil penelitian, yang mungkin tidak dapat diterapkan di negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki konteks ekonomi dan sosial yang berbeda.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan adanya hubungan kompleks antara faktor ekonomi, sosial, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara-negara ASEAN-8 selama periode 2010 hingga 2023. Pertama, meskipun secara teoritis pendapatan per kapita seharusnya berkontribusi positif terhadap IPM, studi ini menemukan hubungan negatif di beberapa negara. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat membatasi manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kualitas hidup masyarakat. Kedua, inflasi terbukti memiliki dampak negatif signifikan terhadap IPM, terutama di negara-negara dengan inflasi tinggi, yang mana dapat mengurangi daya beli serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Ketiga, meskipun angkatan kerja yang besar diharapkan dapat mendorong peningkatan IPM, terdapat variasi hasil di beberapa negara, di mana rendahnya kualitas pekerjaan dan dominasi sektor informal membatasi kontribusi positifnya terhadap pembangunan manusia. Terakhir, IPM memiliki hubungan negatif dengan Rasio Gini, menandakan bahwa peningkatan IPM dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, tetapi manfaat pembangunan manusia tidak selalu merata, terutama di wilayah dengan kebijakan redistribusi yang lemah. Temuan ini menekankan perlunya kebijakan inklusif yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan ASEAN, serta pentingnya investasi di sektor pendidikan dan kesehatan.

### **Referensi**

- Aini, L. N., & Islamy, S. N. (2021). Dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB, dan IPM terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, vol. 6, no. 2, hlm. 85-100.
- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring Inclusive Growth. *Asian Development Review*, 24(1), 11-31.
- Andriani, M. R. (2023). Analisis determinan indeks pembangunan manusia di negara ASEAN tahun 2012-2021. *Jurnal Ekonomi Internasional*, vol. 9, no. 3, hlm. 40-55.
- Arisman. (2018). Determinant of Development Index in ASEAN Countries. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.7 No. 1.

- Bidarbakht-Nia, A. (2019). Measuring Sustainable Development Goals (SDGs): An Inclusive Approach. First published: 19 December 2019 <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12774>.
- Cahyadi, I. F., & Ma'wa, R. (2023). Dampak inflasi terhadap belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, vol. 12, no. 1, hlm. 15-29.
- Daniłowska, A., et al. (2024). Economic Determinants of Development in Emerging Markets. *International Journal of Socioeconomic Studies*.
- Faelassuffa, A., & Yuliani, E. (2021). Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Kajian Ruang*.
- Gani, H., Ibrahim, M., Novriansyah, M. A., & Yakup, A. P. (2023). Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *JEMAI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(1), 29-38.
- Hamzah, M.Z., Risqiani, R., and Sofilda, E. (2012). Human Development Quality And Its Problem In Indonesia. *Ontario International Journal Of Sustainable Development (Online)* Vol. 5 No. 7 Issn 1923-6662.
- Handalani, R. (2019, April 3). Determinan Kemiskinan Daerah Provinsi di Indonesia: Tinjauan Kebijakan Publik. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 59-80
- Haq, A. G. F. (2024). Determinan penyerapan tenaga kerja di 10 negara anggota ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Ketenagakerjaan*, vol. 5, no. 1, hlm. 20-35.
- Haq, Mahbub Ul. (1999). *Reflections on Human Development*. Delhi: Oxford University Press.
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2023). Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja di ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, vol. 11, no. 2, hlm. 60-78.
- Hartani, N. H., Suryanto, T., & Haseeb, M. (2020). Nexus Between Globalization, Income Inequality, and Human Development in Indonesian Economy: Evidence from Application of Partial and Multiple Wavelet Transformations. *Social Indicators Research*, vol 152, 689–714.
- Kawung, G. M. V., & Padambo, M. R. (2021). Analisis pengaruh inflasi terhadap penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, vol. 14, no. 3, hlm. 45-67.
- Mankiw, Gregory N., Quah, Euston., and Wilson, Peter. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nayyar, G. (2013). *"The Service Sector in India's Development."* Cambridge University Press.
- Nurazi, R., Usman, B., & Ekaputri, R. A. (2019). Dynamic Analysis of Corruption, Economic Growth, Income Inequality, and Human Development Index in ASEAN Countries. *International Journal of Economic Studies*, vol 4, no 3, 123–145.
- Omodero. (2019). Government General Spending and Human Development: A Case Study of Nigeria. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol 8 No 1 March 2019.
- Oo, N. N. T. (2022). Determinants of Human Development Index in ASEAN Countries (2000-2019).
- Pangesti, I., & Susanto, R. (2018). Pengaruh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics*, 5(1), 70-81.
- Puteri, A. K., & Maulidyah, I. H. (2024). Influencing analysis human development index in the province Central Java 2018-2022. *Profitability*, 8(2), 159-165.
- Ramadhan, R. (2024). Pengaruh Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2022. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 3(01), 108-118.

- Ravallion, M. (2001). Growth, Inequality, and Poverty: Looking Beyond Averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815.
- Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Durand-Delacre, D. and Teksoz, K. (2016). *SDG Index and Dashboards – Global Report*. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
- Sae-Lim, P. (2020). Implications of Global Risks to ASEAN Development.
- Saragih, Arfah Habib. (2018). An Analysis of Local Taxes Revenue's Effect on Human Development Index. *Jurnal Economia*, Vol. 14, No. 2, p 197-211.
- Sen, Avisek and Laha, Arindam. (2018). Conceptualising the Linkages between Financial Development, Human Development, and Income Inequality: Cross-Country Evidences. *International Journal of Financial Management*. Volume 8 Issue 1.
- Sofilda, Eleonora., Nurhayati., and Hamzah, M.Z. (2015). Government Spending Contributions on per Capita Income and its Effect Toward the Human Development Index (Comparative Study Between Western Indonesia and Central & East Indonesia). *Journal of Social and Development Sciences*. Vol. 6 No. 3 pp. 43-49.
- Susanto, A. B. (2013). Pengaruh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 4, no. 1, hlm. 23-36.
- Syadullah, M., Tenrini, R. H., & Setiawan, S. (2019). The Human Development Index in ASEAN Countries. *Eco-Science*, vol 10, no 2, 100–115.
- Tripathi, N. K., et al. (2024). The Role of Economic Stability in Human Development. *International Journal of Socioeconomic Research*, vol 12, 33–52.
- Theyson, Katherine.C.; and Heller, Lauren.R. (2015). Development and Income Inequality: A New Specification of The Kuznets Hypothesis. *The Journal of Developing Areas*. Vol 49 No. 3.
- World Bank. (2016). *Taking on Inequality*. World Development Report.

## **Ethics declarations**

### **Funding**

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

### **Availability of data and materials**

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

### **Competing interests**

No potential competing interest was reported by the authors